

## **BAB II**

### **Kajian Teori**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu dan Critical Riview**

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu**

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu tentang Bantuan Sosial Tunai. Di antaranya adalah :

1. Sasha Rahmasari, tahun 2018 penelitian berjudul “Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses Di Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini berfokus pada proses pencairan bantuan di kabupaten Wonogiri.
2. Agustinus sale, tahun 2019 penelitian berjudul ”Penyalahgunaan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah: Fakta Nyata Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan” Penelitian ini berfokus pada masalah internal wilayah yang tidak tersalurkan dengan baik bantuan sosial karna oknum tidak bertanggung jawab.
3. Setiawati, tahun 2012 penelitian berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh. Penelitian ini berfokus pada bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang menuntut keadilan pemerintah dalam mendata penerima bantuan.
4. Edo Pramana Putra, tahun 2015 penelitian berjudul “Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia” penelitian ini berfokus pada hasil yang dicapai pemerintah setelah memberikan bantuan sosial.
5. Selviana, tahun 2016 penelitian berjudul “Bantuan langsung Tunai Equibirium Sosiologi”. Penelitian ini fokus pada sudut pandang sosiologi tatanan kehidupan bermasyarakat dalam upaya membentuk harmoni /mencapai keselarasan interaksi sosial.

##### **2.1.2 Critical Rivew**

Sasha Rahmasari, tahun 2018 penelitian berjudul “Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses Di Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini berfokus pada proses pencairan bantuan di kabupaten Wonogiri. Perbedaan dengan peneliti adalah tidak adanya proses hirarki yang di telaah. Namun persamaan dengan peneliti yang dikerjakan saat ini adalah cara pemerintah mendistribusikan bantuan di kabupaten-kabupaten.

Agustinus sale, tahun 2019 penelitian berjudul "Penyalahgunaan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah: Fakta Nyata Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan" Penelitian ini berfokus pada masalah internal wilayah yang tidak tersalurkan dengan baik bantuan sosial karna oknum tidak bertanggung jawab. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis karena terfokus pada laporan oknum yang menyalahi peraturan dalam membagikan bantuan sosial atau bantuan langsung tunai.

Setiawati, tahun 2012 penelitian berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh. Penelitian ini berfokus pada bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang menuntut keadilan pemerintah dalam mendata penerima bantuan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karna penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah dan menuntut keadilan sama rata dalam hal pendistribusian. Persamaan dengan penelitian yang saat ini dikerjakan adalah bahwa penelitian ini sama sama meneliti peningkatan jumlah bantuan untuk masyarakat miskin.

Edo Pramana Putra, tahun 2015 penelitian berjudul "Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia" penelitian ini berfokus pada hasil yang dicapai pemerintah setelah memberikan bantuan sosial. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karna penelitian ini mendata kemiskinan kabupaten tertinggal di indonesia. Persamaan dengan penelitian yang saat ini dikerjakan adalah bahwa penelitian ini sama sama meneliti bantuan sosial untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selviana, tahun 2016 penelitian berjudul "Bantuan langsung Tunai Equilibrium Sosiologi". Penelitian ini fokus pada sudut pandang sosiologi tatanan kehidupan bermasyarakat dalam upaya membentuk harmoni /mencapai keselarasan interaksi sosial. Penelitian ini fokus pada efek bantuan sosial bagi masyarakat tentang kesetaraan. Persamaan dengan peneliti dengan yang dikerjakan saat ini adalah sama sama meneliti bantuan pemerintah secara langsung. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dari fokus penelitian. Dalam penelitian ini berfokus terhadap upaya bantuan social tunai pemerintah untuk korban phk dan terdampak covid 19.

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan upaya distribusi bantuan sosial membutuhkan peran dari Pemerintah agar masyarakat dapat menerima secara merata bantuan sosial.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Sasha Rahmasari	Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses Di Kabupaten Wonogiri	Analisa data yang digunakan adalah analisis data model interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Mengetahui durasi proses pencairan bantuan di kabupaten Wonogiri. Dari pusat sampai ke kabupaten.
Agustinus sale	Penyalahgunaan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah: Fakta Nyata Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka	Hasil penelitian menemukan beberapa di wilayah kabupaten tidak tersalurkan dengan baik. Dan dana pencairan tidak penuh sesuai ketentuan.
Setiawati	Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh	Kualitatif, Observasi	Adanya komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan sosial tepat sasaran.
Edo Pramana	Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia	Deskriptif dan eksploratif dengan kajian sejarah, budaya dan kebijakan	Hasil penelitian diperoleh pertumbuhan ekonomi tiap tahun dikarenakan daya beli masyarakat naik dan tingkat kemiskinan berkurang.
Selviana	<i>Bantuan langsung Tunai dalam segi status sosial masyarakat</i>	<i>Menggunakan teknik penelitian kualitatif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi</i>	<i>Sudut pandang sosiologi tatanan kehidupan bermasyarakat dalam upaya membentuk HARMONI /mencapai keselarasan interaksi sosial</i>

## **2.2 Landasan Teori**

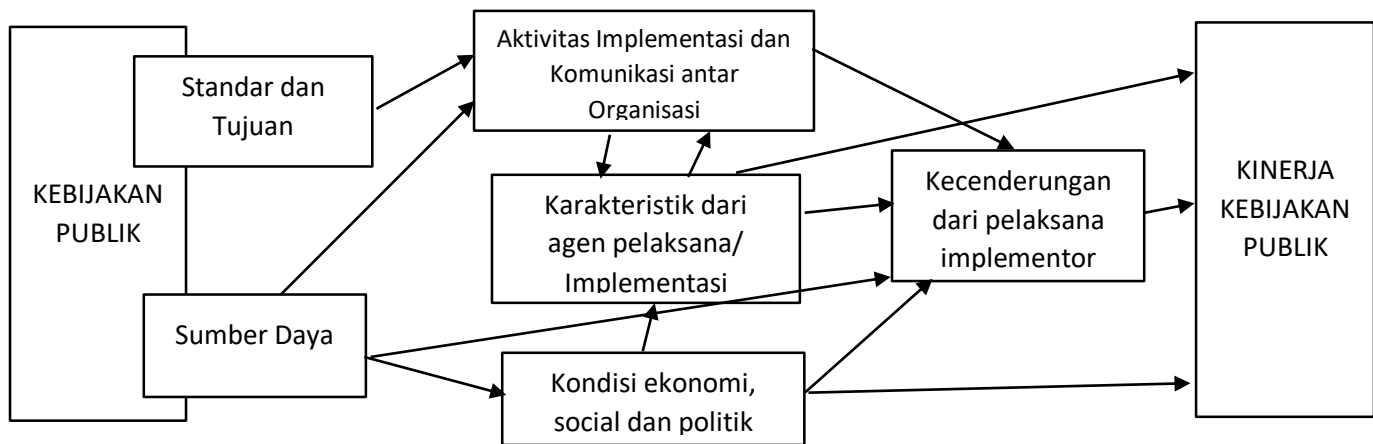
### **2.2.1 Teori Implementasi kebijakan**

Fokus dari Implementasi Kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Pada sisi lain, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu yang tertentu pula. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Grindle (dalam Solichin, 1990:45) menyebutkan bahwa Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.3.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber: (Riant Nugroho, 2006: 128)

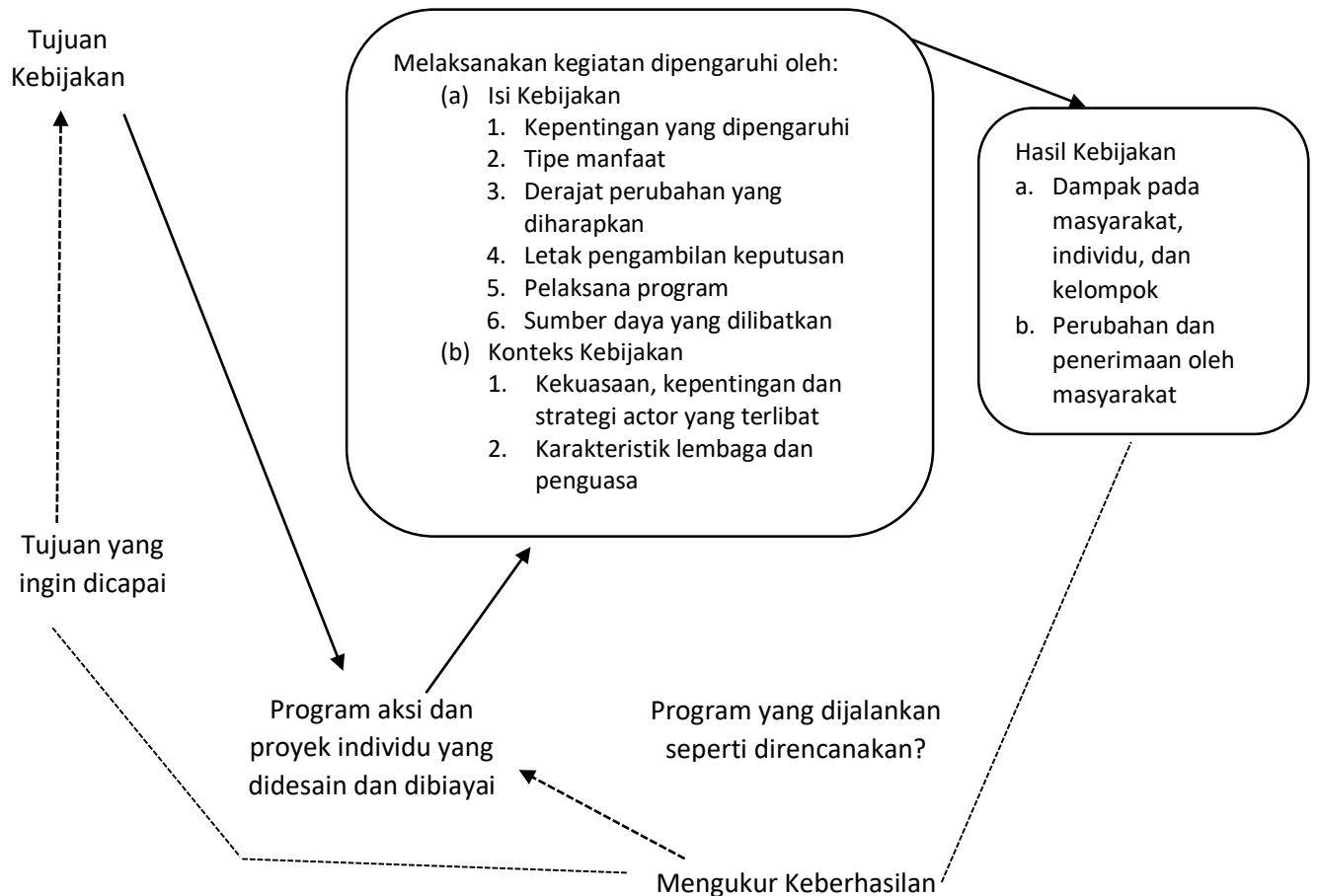
**Gambar 2.1**

Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Meter dan Horn (1975) dalam Wibawa (1994:19) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Selain itu dengan model ini indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Variabel-variabel yang dijelaskan Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut: (1) Standar dan tujuan

- kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, (4) Karakteristik dari agen pelaksana/Impelemtor, (5) Kondisi ekonomi, social, dan politik, (6) Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

### 2.3.2 Model Implementasi Menurut Grindle



Sumber: Samodra Wibawa, 1994:23

**Gambar 2.2**  
Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan, tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada implementability dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) tipe atau jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program?, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Demikian dengan konteks kebijakan juga mempengaruhi proses implementasi. Yang dimaksud oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah: (1) kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektivitas implementasi. Hal ini searah dengan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana juga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994: 22-25).

Berdasarkan dari pembahasan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Houten serta Grindle, dapat diambil beberapa kesimpulan. Keduanya menegaskan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (1) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (2) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, kontrol dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan

dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi. Peneliti mengambil model Implementasi kebijakan oleh Grindle.

### **2.3.3 Kriteria Implementasi**

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

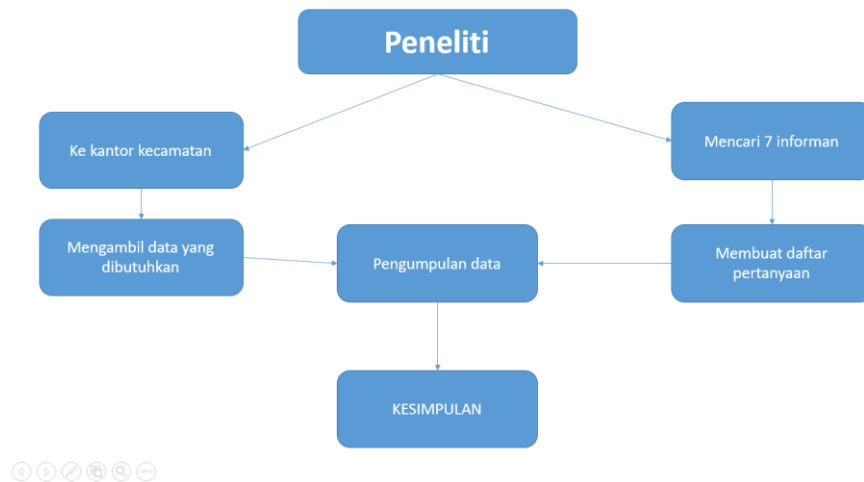
Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (lihat Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber kebijakan, (3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (5) sikap para pelaksana, dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.



Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang mengembangkan “kerangka kerja analisis implementasi” (lihat Wahab, 1991: 117). Menurutnya, peran penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan Sabatier diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: (1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (i) kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (v) rekrutmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: (i) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan publik, (iii) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari pejabat atasan, dan (v) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007: 16). Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup: (i) output kebijakan badan pelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, (iii) dampak nyata output kebijakan, (iv) dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan (v) perbaikan.

## 2.2.6 Kerangka Dasar Pemikiran



Penulis ingin melihat kualitas pelayanan di Kecamatan Sumobito – Jombang atas dasar melihat beberapa kasus tidak tepat sasaran bantuan sosial tunai senilai 500.000 rupiah yang di distribusikan ke warna terdampak covid-19. Ada yang mampu dapat bantuan, ada yang miskin tapi tidak mendapat bantuan. Bisa dari faktor data KTP tidak valid, KK tidak valid atau sudah terdaftar menjadi PKH.

Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Laporan dari Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia menyebutkan adanya peningkatan jumlah pengangguran sejak meluasnya Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat Covid lebih daripada krisis ekonomi di tahun 1998.

Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah. Jika kita mengamati masyarakat setelah mendapat bantuan akan di belanjakan untuk kebutuhannya. Hal ini sungguh sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi yang notabnya resesi. Di kecamatan Sumobito Jombang setelah masyarakat mendapat bantuan bisa kita lihat pasar dan pertokoan sudah berangsur membaik dan pulih.